

GENDER AND POLITICS:
Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik

Ulfatun Hasanah,¹ Najahan Musyafak²
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
e-mail: ulfatunhasanah92@gmail.com;
najahan_musyafak@walisongo.ac.id

Abstrak

Gender issues are an issue that demands social and cultural construction justice between men and women. In the demands of this construction, the balance of functions, status, and nature of the sexes is expected to be realized. Instead, development is a construction of the changes that take place in society from certain socio-cultural conditions toward something that is considered more valuable. In addition it can also be interpreted as an effort to alleviate backwardness. Therefore, all, gender and development are a reciprocal correlation between one another. The emergence of gender injustice issues or gender discrimination due to social construction process in society. Yet Islam and the Constitution of 45 countries have guaranteed equality of access for women and men. Therefore, enhancing the role of women and men in gendered development as an integral part of national development has significance in the effort to achieve harmonious harmony between men and women or to achieve gender equality and justice in various areas of life and development. The results of this study, trying to reveal gender in development should not be the same role between men and women, there are areas of their own that can be done by men and women.

Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu

¹Program Magister KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, Semarang.

dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu semua, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain. Munculnya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender akibat adanya proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Padahal Islam dan UUD 45 negara telah menjamin kesetaraan akses perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, peningkatan peranan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hasil penelitian ini, berusaha menampakkan gender dalam pembangunan tidak harus sama peran antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah sendiri yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: gender; konstruksi sosial; komunikasi; pembangunan

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan isu penting yang tidak pernah berhenti dibahas baik di negara terbelakang, negara berkembang, sampai dengan negara maju. Walaupun konteks yang dibicarakan dan cara yang digunakan mereka berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya tujuan yang diharapkan semua sama, yakni membawa negaranya masing-masing dari keadaan sebenarnya saat ini menuju keadaan normatif yang dianggap lebih baik.²

Tidak dapat disangkal lagi bahwa partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan sangatlah penting dan bahkan menentukan. Menurut Ginanjar Kartasmita (1955) "pembangunan memang dapat juga berjalan dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah namun hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi rakyat". Karena partisipasi masyarakat³ tersebut sangat penting,

²Afriandi Setiawan, dkk, *Gender dan Pembangunan*, dalam <https://arificintaselvia.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/>.¹ diakses Desember 2011.

³Menilik asal usul istilah komunikasi pembangunan, pertama kali diciptakan pada tahun 1972 oleh Nora, Quebral. Ia mendefinisikan komunikasi pembangunan sebagai: *the art and science of human communication linked to a society's planned transformation from a state of poverty to one of dynamic socioeconomic growth that makes for greater equity and the larger unfolding of individual potential* (sebuah seni dan ilmu pengetahuan komunikasi manusia yang

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia disebutkan bahwa partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata. Adapun pengertian partisipasi di sini diwujudkan dalam memikul beban, tanggungjawab dalam pelaksanaan dan menerima kembali hasil-hasil pembangunan. Meskipun istilah partisipasi sudah menjadi jargon politik yang pewujudannya dalam proses pembangunan ini diinginkan oleh semua orang, tapi sebagai istilah, perkataan partisipasi belum mendapatkan batasan pengertian yang jelas.

Adanya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan, sering dikaitkan dengan upaya menumbuhkan rasa memiliki ("*sense of ownership*" atau "*sense of belonging*") terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan adanya rasa memiliki ini pada gilirannya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*).

Pembangunan pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, kepada laki-laki maupun perempuan, kepada yang kaya maupun yang miskin (*Teori Fungsionalisme, Talcot Parson*).⁴

berhubungan dengan sebuah transformasi sosial yang direncanakan dari suatu negara yang miskin kepada satu dinamika pertumbuhan ekonomi-sosial yang menciptakan keadilan yang merata dan membentangkan individu yang seluas-luasnya). Komunikasi hadir pada semua upaya yang bertujuan terarah untuk membawa ke arah perubahan. Tetapi ini tidak berarti bahwa komunikasi itu faktor yang paling menentukan. Komunikasi hanyalah salah satu dari sekian komponen faktor-faktor yang paling penting adalah yang menentukan organisasi struktural masyarakat, kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang menepati batas-batas tempat perubahan bisa terjadi. Menurut Royal D. Colle terdapat tujuh benang yang mempunyai sumbangsih dalam komunikasi pembangunan, salah satunya yaitu *The Community Participation Thread* (benang partisipasi masyarakat). Secara historis, gagasan lahirnya Komunikasi Pembangunan Partisipatif sendiri diilhami oleh pemikiran intelektual dari Amerika Latin oleh Paulo Freire, kemudian diikuti oleh Luis Ramiro Beltran, dan Juan Diaz Bordenave. Istilah *Participatory Communication* sendiri pertama kali digunakan secara resmi dalam sebuah seminar di Amerika Latin (1978) yang disponsori oleh *Center for Advanced Studies and Research for Latin America*. Jadi, komunikasi pembangunan partisipatif adalah suatu aktifitas yang direncanakan yang didasarkan pada proses-proses partisipatif di satu sisi, dan pemanfaatan media komunikasi dan komunikasi tatap muka di sisi lain, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog diantara pemangku kepentingan yang berbeda, yang berkisar pada perumusan masalah atau sasaran pembangunan bersama, mengembangkan dan melaksanakan atau menjabarkan seperangkat aktivitas yang memberi kontribusi untuk mencari solusi yang didukung bersama.

⁴Teori Struktural-Fungsional. Teori ini muncul di tahun 1930-an sebagai kritik terhadap teori evolusi. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengkui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada

Fakta yang ada sekarang justru pembangunan semakin mempertajam kesenjangan keadilan sosial antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang kaya, antara perempuan dengan laki-laki, antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok masyarakat biasa. Hal ini terlihat adanya ketidakadilan gender dalam pembangunan.

Lalu, *benarkah perempuan termarginalkan? Benarkah adanya ketidakadilan gender dalam pembangunan?* Bertitik tolak dari problem yang ada di masyarakat bahwa adanya diskriminasi perempuan atau perempuan termarginalkan. Penulis berusaha mencoba mengupasnya lebih dalam.

B. Selayang Pandang Gender

Isu gerakan gender berasal dari Barat pada sekitar ± tahun 1980 (diresmikan) sedangkan tahun 1960-an sudah ada tetapi belum diresmikan yang sering disebut dengan istilah feminisme.⁵ Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmu-

konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya interelasi demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*). Sistem ini mensyaratkan aktor dalam jumlah memadai, sehingga fungsi dan struktur seseorang dalam sistem menentukan tercapainya stabilitas atau harmoni tersebut. Ini berlaku untuk sistem sosial: agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga, dalam hal ini termasuk mengenai gender. Sosialisasi fungsi struktur tersebut dilakukan dengan institusionalisasi, melalui norma-norma yang disosialisasikan. Secara rinci teori ini berisi: (1) masyarakat memiliki kelembagaan yang mirip organ tubuh biologi, saling terkait dan tergantung satu dengan yang lain, (sistem), (2) setiap lembaga masyarakat mempunyai fungsi yang jelas dan khas, untuk melakukan tugas menunjang kestabilan dan kemajuan masyarakat, (3) *functional emperatif*, yaitu AGIL (*Adoption to the environment, goal attainment, integration and latency*), Lembaga ekonomi untuk A, Pemerintah untuk G, Lembaga Hukum dan Agama untuk I dan Lembaga Pendidikan dan Keluarga untuk L.

⁵Gerakan feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang dimotori oleh para pelopor feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai lama (patriarki) yang selalu dilindungi oleh kokohnya tradisi struktural fungsional. Gerakan feminisme modern di Barat dimulai pada tahun 1960-an yaitu pada saat timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas. Menurut Skolnick: Some feminists denounced the family as a trap that turned women into slaves (beberapa feminis menuduh keluarga sebagai perangkap yang membuat para perempuan menjadi budak-budak). Gerakan feminisme yang berdasarkan model konflik berkembang menjadi gerakan-gerakan feminisme liberal, radikal, dan sosialis atau Marxisme. Untuk memahami konsep feminisme berikut diuraikan berdasarkan sejarah berkembangnya gerakan feminisme yang mencakup dua gelombang: (1) Gerakan gelombang pertama, lebih pada gerakan filsafat di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet yang pada tahun 1785, suatu perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg (Selatan Belanda). Seorang aktivis sosialis utopis bernama Charles Fourier pada tahun 1837 memunculkan istilah feminisme yang kemudian tersebar ke seluruh Eropa dan benua Amerika.

wan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil.⁶

Istilah gender pertama kali di perkenalkan oleh Robert Stoller (1968). Secara *etimologi* (bahasa), kata “jender” berasal dari bahasa Inggris, *gender* berarti “jenis kelamin”, sedangkan menurut bahasa Arab gender berarti “مسوة جسية”. Sedangkan secara *terminologi* (istilah), gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁷ Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang.⁸

Gender - A way of looking at society which focuses on women's roles and responsibilities in relation to those of men. Gender - is not a property of individuals but an ongoing interaction between actors and structures with tremendous variation across men's and women's lives "individually over the life course and structurally in the historical context of race and class. (Ferree 1990 dalam Lloyd et al. 2009: p.8)

Di dalam buku yang berjudul *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips, mengartikan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan

Publikasi John Stuart Mill dari Amerika dengan judul *The Subjection of Women* pada Tahun 1869 yang melahirkan feminisme Gelombang Pertama. (2) Feminisme gelombang kedua, dimulai pada tahun 1960, dengan terjadinya liberalisme gaya baru dengan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen. Era Tahun 1960 merupakan era dengan mulai ditandainya generasi “baby boom” (yaitu generasi yang lahir setelah perang dunia ke-2) menginjak masa remaja akhir dan mulai masuk masa dewasa awal. Pada masa inilah, masa bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut dalam kancah politik kenegaraan.

⁶Herien Puspitawati, “Konsep, Teori dan Analisis Gender”, dalam artikel Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor 2013, h. 1. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>

⁷Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008), h. 315.

⁸Sinulingga, R. dalam *Jurnal Wawasan*, Juni, Volume 12, Nomor 1, Medan: USU 2006, h. 47.

perempuan. Hal ini dapat dilihat, misalnya bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki sebaliknya, yaitu dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.⁹

Dalam implementasinya, terjadi kerancuan dalam memahami gender dan seks. Pengertian gender itu berbeda dengan pengertian jenis kelamin (*sex*). Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin:

Tabel 1.
Perbedaan Sex dan Gender¹⁰

No.	Aspek	Gender	Jenis Kelamin (<i>Sex</i>)
1	Dasar	Konstruksi sosial.	Takdir
2	Pencirian	Persepsi kultur (non-biologis)	Biologis
3	Status yang dibentuk	Feminin, maskulin. Contohnya: a. Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. b. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga.	Perempuan, laki-laki Contohnya: Laki-laki memiliki penis, jakala (kala menjing), dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.
4	Peran sosial	a. Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, disamping	a. Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka

⁹M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 8-9.

¹⁰Afriandi Setiawan, dkk, *Gender dan Pembangunan*, diakses 2011, dalam <https://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/>.

		menjadi istri juga. b. Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri. Atau Sifat-sifat perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang memiliki sifat lemah lembut dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.	selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya. b. Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.
5	Jangkauan	Kelompok sosial tertentu.	Universal, seluruh dunia.

C. Gender dan Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial¹¹ merupakan pembentukan dari sistem konseptual kebudayaan dan linguistik. Konstruksi sosial juga bertujuan membuat dunia bermakna kepada yang lain. Makna tercipta dari sistem alih kode, aturan atau kesepakatan maupun tanda secara historis. Konstruksi peran gender adalah bagaimana peran gender dibentuk dari kebudayaan dan disosialisasikan.

Gender juga merupakan alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Ditegaskan bahwa gender adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dan ternyata, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi, sosial budaya bahkan melalui kekuasaan negara. Sedemikian panjang dan lamanya proses “genderisasi” secara sosial budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya menjadi seolah-olah ketentuan dari Tuhan, atau bersifat kodrati dan

¹¹Konstruksi sosial lahir dari pemikiran Peter L. Berger, dituangkan dalam karya yang terkenal, yaitu *Innovation to Sociology* (1963) dan *The Social Contructions of Reality* (1966) yang ditulis bersama temannya, Thomas Luckmann. Dalam bukunya tersebut, dinyatakan bahwa realitas terbentuk secara sosial, oleh karenanya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan harus menganalisa bagaimana proses tersebut terjadi.

biologis yang tidak dapat diubah lagi. Artinya, ada anggapan sebagian besar masyarakat yang namanya kodrat wanita adalah hasil konstruksi sosial dan budaya atau gender. Gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Perbedaan yang ditentukan oleh aturan masyarakat dan bukan biologis itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan.

Perbedaan peran gender yang merupakan bentukan masyarakat tersebut disosialisasikan terus menerus melalui pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam: keluarga (orang tua), sekolah (guru), negara (pembuat kebijakan, penguasa), dan dimasyarakat (tokoh masyarakat, pemuka agama, media massa, dan lain-lain). Misalnya saja sejak kecil anak sudah dibiasakan dengan mainan yang berbeda, untuk anak laki-laki mobil-mobilan, senjata, robot, dan sebagainya, sedangkan perempuan diberikan boneka, peralatan rumah tangga, dan pelatan masak. Pemberian mainan tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada anak tentang perbedaan peran masing-masing, bahwa laki-laki menjadi gagah, pemberani, dan kelak menjadi penanggung jawab keluarga. Sedangkan kepada perempuan diharapkan bisa mempunyai sifat keibuan yang pintar mengurus anak, masak dan mengurus rumah. Pendidikan dan pembiasaan demikian telah berlangsung lama dan turun temurun tanpa ada yang mempertanyakan, sehingga terjadi proses internalisasi yang lancar tanpa hambatan. Tidak mengherankan jika kemudian perbedaan yang merupakan hasil bentukan masyarakat tersebut dipahami sebagai kodrat. Oleh karena itu pula masyarakat sangat memegang teguh 'aturan-aturan' yang membedakan peran perempuan dan laki-laki. Namun, di sisi lain banyak pula yang 'melanggar' dan pada akhirnya masyarakat bisa menerima pula.

Hubungan atau relasi antar jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) atau relasi gender dipengaruhi oleh pandangan yang ada antara keduanya. Posisi perempuan maupun laki-laki sedemikian rupa, dibangun dalam beragam level:

1. Di tingkat keluarga, institusi keluarga merupakan ruang awal peran dan ideologi gender diperkenalkan. Contohnya, keluarga yang mendambakan anak laki-laki menyiapkan segala perlengkapan bayi yang belum lahir dengan warna biru sebagai warna tegas, dan merah bila anaknya perempuan. Pemberian alat permainan yang stereotip pada anak-anak juga merupakan

pandangan gender. Anak laki-laki pastinya tidak diharapkan untuk bermain boneka atau memasak. Pada komunitas tertentu anak laki-laki tidak dituntut untuk bisa memasak atau melakukan pekerjaan kerumah tangga. Sementara anak perempuan diajarkan untuk membantu ibu di rumah dan lain-lain. Pola pengasuhan dan pendidikan ini akan mempengaruhi pandangan sang anak kelak dalam memilih dan menyesuaikan profesi dan keahliannya. Ini karena mereka terdidik dan diperlakukan demikian. Dan demikian seterusnya. Keluarga berperan melanggengkan bentuk dan relasi gender, baik yang adil maupun yang timpang.

2. Di tingkat sekolah/pendidikan formal, isi ajaran pendidikan di sekolah menjadi salah satu dasar pola perilaku dan pandangan mengenai posisi, peran, tanggung jawab dan fungsi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ini bisa dilihat dari kurikulum pengajaran dan cara mendidik di sekolah. Ini tidak hanya dialami oleh peserta didik, namun juga pendidik atau guru. Ada banyak bukti pembedaan perlakuan antara guru laki-laki dan guru perempuan. Banyak buku-buku pelajaran yang dibuat dengan bahasa dan ilustrasi yang melanggengkan stereotip peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki. Misalnya, ada buku yang mengajarkan bahwa kegiatan anak perempuan membantu ibu di rumah setelah pulang sekolah sementara anak laki-laki digambarkan bermain bola.
3. Di tingkat masyarakat, masyarakat sebagai wadah pencetak budaya, nilai, norma, dan tradisi yang mencerminkan pola relasi antara perempuan dan laki-laki. Pemaknaan dan pemberian posisi, peran, dan tanggung jawab akan masing-masing jenis kelamin dan gender dibentuk dalam bahasa masyarakat sesuai dengan tingkat kepantasan. Masyarakat seolah memiliki kriteria dan hukum mengenai apa yang pantas, layak dan wajar juga yang tidak layak, tidak pantas dan di luar kewajaran yang dilakukan oleh laki-laki, juga oleh perempuan.
4. Di tingkat negara/pemerintah, banyak program pemerintah dan kebijakan Negara yang dibangun dengan konstruksi gender yang stereotip. Misalnya, Posyandu merupakan program kesehatan anak yang dibangun untuk perempuan, dengan asumsi perempuan atau ibu merupakan pihak yang bertanggung jawab pada kondisi kesehatan keluarga (anak). Sementara banyak pelatihan teknis (seperti bidang pertanian) hanya bisa diakses laki-laki, seolah tidak ada perempuan yang menggeluti bidang ini. Namun saat ini gencar

dikampanyekan gerakan keterlibatan ayah di kegiatan Posyandu. Hal ini telah berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, meskipun masih sangat terbatas. Perubahan kebijakan ini tentu melihat kebutuhan bahwa perempuan semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena juga dibutuhkan pemikirannya, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik, karena keduanya memiliki nilai yang sama. Termasuk menakar nilai kegiatan produktif (menghasilkan pendapatan) dan reproduktif. Ini artinya perspektif kebijakan yang stereotip akan menciptakan program yang sangat stereotip dan menjadi pembenaran dan pelanggaran. Negara dan pemerintah menjadi salah satu institusi yang bertanggungjawab pada pola relasi gender pada masyarakatnya.¹²

D. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Kita ketahui bahwa salah satu misi Islam adalah pembebasan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Keadilan ini tidak akan tercapai tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas.¹³

Rasulullah juga mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁴ Pada masa *jahiliyyah* perempuan sempat mendapatkan perlakuan bias gender seperti: diperkosa, simpanan laki-laki, beban ganda, kekerasan nafsu laki-laki, dan sebagainya. Setelah Islam datang, masa Rasulullah perempuan dan laki-laki

¹²Anisa Siti Aisah, dkk, "Gender Sebagai Konstruksi Sosial", diakses Jum'at 10 Juni 2016, dalam [http:// tangan-malaikat.blogspot.com/2016/06/makalah-gender-sebagai-konstruksi-sosial.html?m=1](http://tangan-malaikat.blogspot.com/2016/06/makalah-gender-sebagai-konstruksi-sosial.html?m=1).

¹³Jihan Abdullah, "Kesetaraan Gender dalam Islam", *Jurnal Musawwa*, Vol. 1 (1), 2009, h. 4.

¹⁴Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil (*equity*) dan setara (*equality*) dalam hak, kesempatan dan hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, dengan kondisi saling mendukung/ melengkapi dan saling menghormati/ menghargai. Kesetaraan gender: Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result."

posisinya setara. Pada masa Rasulullah dan sahabatnya, sekian banyak perempuan/istri yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Satim binti Malhan yang merias pengantin antara lain: Shafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad. Bahkan istri Nabi Muhammad Zainab binti Jahesy juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau bersedekah. Selain itu, Siti Khatijah juga sebagai *bisnis woman*. Raihah, istri sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. Bahkan pada masa Raja Sulaiman, Ratu Bilqis menjadi sudah menjadi Ratu satu jagad dunia. Setelah Rasulullah meninggal, realita yang ada bias gender mulai muncul kembali.¹⁵

Dalam al-Qur'an sangat menjunjung kesetaraan dan keadilan gender meskipun hanya tersirat (tekstual) saja. Yang ada hanya ciri-ciri/ prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Banyak ayat menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Nasaruddin Umar mencoba mengkompilasinya sebagai berikut: (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. al-Hujurat:

¹⁵Bias gender muncul lagi disebabkan, ketika penafsiran yang terkait dengan perempuan-an selalu saja didefinisikan melalui konsep fikih, perempuan dipandang inferior dengan landasan tafsir yang mengandung bias misoginis. Hal tersebut dapat jadi karena adanya beberapa hal, antara lain ialah sebagai berikut: (1) Pemahaman terhadap pengertian gender dan seks dalam mendefinisikan peran seringkali belum pas. (2) Metode penafsiran yang selama ini digunakan, masih banyak mengacu pada pendekatan tekstual, bukan kontekstual; sebagai konsekuensi qaidah ushul yang biasa dijadikan pegangan jumhur ulama tafsir (*al ibrah bi umum al lafdzi, la bi khusus as sabab*), (3) Umumnya mufassisr adalah kaum laki-laki, (4) Banyak dikesankan bahwa kitab suci al-Qur'an banyak memihak laki-laki dan mendukung sistem patriarkhi, yang oleh kalangan feminis dipandang bisa merugikan perempuan, dan (5) Pengaruh kisah Israiliyat yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah. Bias gender tidak hanya terjadi dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat, melainkan juga muncul dalam pemahaman hadis Nabi Muhammad. Bahkan, bias gender juga ditemukan dalam penafsiran banyak literatur Islam klasik (kitab kuning), terutama dalam penafsiran kitab-kitab fiqh yang pada umumnya sering dianggap mutlak kebenarannya. Lihat: Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 2-4; Jika kita perhatikan uraian di atas, maka pandangan yang menginterpretasikan bahwa Islam menganggap wanita itu lemah, tidak cerdas, tidak layak menjadi pemimpin, derajat wanita di bawah tingkatan laki-laki, dan pandangan-pandangan lain yang meminggirkan wanita pada dasarnya karena kesalahan dalam menginterpretasikan teks-teks agama yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, penafsiran ini perlu diluruskan dan perlu dicarikan solusinya, atau dengan kata lain, perlu adanya reinterpretasi. Lihat: Khariri, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita", Ying-Yang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, STAIN Purwokerto, Vol. 4 (1) 1, 2009; Menurut Umar bias gender dalam penafsiran teks-teks kitab suci al-Qur'an dapat ditelusuri. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 268-290.

13), (2) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (QS. al-Baqarah: 30), (3) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (QS. al-A`raf: 172), (4) Adam dan Hawa adalah aktor yang sama-sama aktif terlibat dalam drama kosmis (QS. al-A`raf: 22), dan (5) Laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya (QS. al-Nahl: 97). Misi pokok kitab suci al-Qur`an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual. Sehingga bila terdapat penafsiran yang mengarah kepada nilai ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti dan dikaji kembali (direinterpretasi).¹⁶

Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur`an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Menurut Asghar, al-Qur`an lah yang pertama kali memberikan mereka (perempuan) hak-hak yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam aturan yang legal.¹⁷

Islam sendiri bukan agama patriarki.¹⁸ Islam tidak mengajarkan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah seorang laki-laki. Islam mengajarkan bahwa seorang perempuan ketika menikah maka tanggungjawab atas dirinya berada di diri laki-laki yang menjadi suaminya. Hadis menunjukkan bahwa Islam memberikan penghormatan yang besar terhadap perempuan, karena sebaik-baiknya laki-laki muslim adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Islam memberikan kehormatan yang tinggi bagi para muslimah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mencari nafkah. Bukannya menggambarkan wanita sebagai orang yang lemah dan tukang membebani laki-laki, tetapi ini adalah penghormatan Islam kepada perempuan sehubungan dengan tugas mereka yang amat vital di dalam rumah keluarganya.

¹⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur`an*, h. 247-268.

¹⁷*Ibid*, h. xxxiv-xxxv.

¹⁸Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.

Islam memberikan kewajiban dan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, namun laki-laki diberikan satu tingkat lebih tinggi dibanding perempuan bukan untuk merendahkan tapi dalam sebuah rumah tangga laki-laki menjadi imam yang memiliki tanggungjawab serta tugas yang tidak mudah dalam menjaga istri dan anak-anaknya kelak.¹⁹ Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat: 13)²⁰

Berdasarkan ayat di atas, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Tugas pokok hamba adalah mengabdikan dan menyembah. Ini dapat dipahami dalam firman-Nya: “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku” (QS. al-Dzariyat: 56). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai ketaqwaannya. Prestasi ketaqwaan dapat diraih oleh siapa pun, tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.²¹

E. Gender dalam Pembangunan

Walaupun mencuatnya isu gender lebih disebabkan karena gertakan dari kaum feminisme, namun pembangunan tetaplah hal yang universal. Oleh karena itu, bila tuntutan tersebut hanya mengacu pada substansi perempuan, maka akan

¹⁹ Anonim, “Apa Arti Budaya Patriarki?”, dalam http://id.answers.yahoo.com/question/index?_e_pi_=7%2CPAG_ID10%2C3573569691.

²⁰ Depag RI, Al-Hidayah (Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka), (Jakarta: PT Kalim, 2010), 518.

²¹ Fadlan, “Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an”, dalam Jurnal Karsa, Vol. 19 (2), 2011, h. 13.

menjadi pertanyaan balik bagi kaum laki-laki, kaum laki-laki akan menuntut hal yang sama. Oleh karena itu, maka gender merupakan suatu hal yang harus dipandang secara keseluruhan dalam pembangunan.

Apabila dibayangkan, hubungan antara gender dengan pembangunan terasa masih membingungkan. Padahal, bagaimanapun metode dan konsep pembangunan pasti akan diikuti atau berpengaruh pada kehidupan baik spesifik pada laki-laki, perempuan, atau keduanya. Oleh karena itu, pembahasan gender dengan pembangunan bukanlah hal yang dapat diapresiasi dengan sikap skeptis. Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain.

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari adanya pembangunan. Substansi dari kesejahteraan salah satunya dengan adanya keadilan. Keadilan sendiri bukanlah hal yang dapat dengan mudah diperhitungkan secara matematis. Keadilan dalam ekonomi belum dapat dikatakan sebagai kesimpulan keadilan, melainkan baru sebatas substansi keadilan. Untuk itu, aspek manusia tidak dapat diabaikan, karena sudah hakekat manusia sebagai *homo politicus*. Lantas, pertanyaan yang muncul adalah tentang bagaimana cara pembenahan bila dari segi manusia dalam bersosial tidak ada kesejahteraan?. Mencoba mendalami isu ini, maka muncul pertanyaan baru, yakni apakah pembangunan yang tujuan utamanya untuk mencapai kesejahteraan mengabaikan atau hanya sekilas mengintip masalah gender? Inilah yang selalu dipertanyakan dan dituntut oleh para aktivis gender, khususnya kaum feminisme.

Melihat fakta yang ada selama ini ada, memang dapat dirasakan bahwa pembangunan yang dilakukan hanyalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak kapitalis. Kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari pembangunan dirubah menjadi unsur pembangunan. Pembangunan sampai dewasa ini lebih meningkatkan dari segi infrastruktur dan ekonomi. Sektor keseimbangan dalam hal

ini gender kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan bahwa terdapat suatu penyimpangan dalam konsep pembangunan.

Akibatnya adalah gender mengalami eksklusi sosial yaitu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Maka terciptalah ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender dalam pembangunan.²²

Lalu, benarkah jika perempuan termarginalkan dalam pembangunan? Isu ini muncul akibat proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Peran perempuan pada urusan domestik. Beberapa artikel, jurnal, buku menyebutkan bahwa perempuan dalam pembangunan selama ini termarginalkan. Fakhri (1999) menjelaskan ketidakadilan gender²³ tersebut antara lain: 1) marginalisasi perempuan, 2) penempatan perempuan pada subordinat, 3) stereotype perempuan, 4) kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dan 5) beban kerja tidak proporsional.

Isu ini, melahirkan pendekatan awal mencakup penargetan perempuan dalam perencanaan dan intervensi proyek yang berfokus pada perempuan sebagai kelompok terpisah. Hal ini biasa disebut sebagai *Women In Development - WID* dan *Women And Development - WAD*.²⁴ Kritik terhadap pendekatan ini

²²Afriandi Setiawan, dkk, *Gender dan Pembangunan*, diakses 2011, dalam <https://arificintaselvia.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/>.

²³Ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.

²⁴(1) Perempuan dalam Pembangunan (*Women In Development-WID*). Pendekatan WID muncul pada dekade 70-an sebagai produk dari gerakan kaum feminis liberal Amerika yang melihat bahwa kaum perempuan diabaikan dan tereksklusi dari program pembangunan. Para penganut pendekatan WID yakin bahwa pembangunan tidak akan terjadi jika perempuan tidak dimasukkan di dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu untuk mengatasi marginalisasi perempuan, mereka memperjuangkan penerapan proyek pembangunan terpisah atau terintegrasi untuk kaum perempuan. Asumsi yang mereka kemukakan adalah jika kaum perempuan mendapat akses pada sumber daya seperti kredit, pelatihan, kegiatan peningkatan penghasilan maka kaum perempuan akan mampu meningkatkan posisinya sejajar dengan laki-laki. Penerapan konsep WID ini ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam

menuding bahwa pendekatan ini tidak mengurus soal laki-laki, yang lalu mendorong munculnya model yang disebut *Gender And Development-GAD*), yang lebih berkonsentrasi pada perencanaan dan intervensi proyek yang berfokus pada proses pembangunan yang mentransformasikan relasi gender. Tujuan dari GAD adalah membuat perempuan mampu berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam menentukan masa depan bersama. Maka dari itu pendekatan kesetaraan gender adalah mengenai laki-laki dan perempuan dan merupakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menganalisis dan merencanakan intervensi pembangunan karena mempertimbangkan situasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender bertujuan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menyikapi permasalahan mereka terkait pembangunan, mereformasi lembaga-lembaga untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara, serta mendorong perkembangan ekonomi yang menguatkan kesetaraan partisipasi. Pendekatan semacam itu bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan yang terus ada terkait akses terhadap sumber daya alam dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat.

pembangunan. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang membelenggu kebanyakan penduduk negara berkembang, menimbulkan peran sosial budaya dan ekonomi kaum perempuan tersubordinasi oleh laki-laki. (2) Perempuan dan Pembangunan (*Women And Development- WAD*), Kegagalan pendekatan WID dalam memperjuangkan perbaikan posisi kaum perempuan dalam pembangunan, menyebabkan perlunya pendekatan lain yang disebut pendekatan Perempuan dan Pembangunan (*Women And Development-WAD*). Para pendukung pendekatan WAD berpendapat bahwa kaum perempuan tidak akan pernah mendapatkan bagian dari manfaat pembangunan yang adil dan merata jika pengaruh budaya patriarki belum dapat diatasi. Mereka melihat bahwa mengatasi kemiskinan dan dampak kolonialisme juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan. Pendekatan WAD ternyata juga gagal dalam mempengaruhi akses kaum perempuan dalam program pembangunan. (3) Gender dan Pembangunan (*Gender And Development-GAD*). Kegagalan pendekatan WID dan WAD menyebabkan pada tahun 1980-an muncul pendekatan Gender dan Pembangunan (*Gender And Development-GAD*). Para pendukung pendekatan GAD melihat bahwa terjadi subordinasi perempuan di bawah pengaruh ayah dan suami mereka. Oleh sebab itu dengan meningkatkan akses perempuan pada layanan publik dapat mengatasi persoalan subordinasi tersebut. Pendukung pendekatan GAD berpendapat bahwa nilai peran produksi (kerja berbayar dan kerja tak berbayar) serta peran reproduksi (melahirkan dan merawat anak) para ibu rumah tangga dapat memberikan manfaat pada rumah tangga dan industri. Tujuan akhir pendekatan GAD adalah terjadinya pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan otonomi lebih besar terhadap kaum perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan. Oleh sebab itu pemerintah telah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. dalam Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), h. 202-209.

Strategi ini disebut *Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)* yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sampai Daerah. Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya atau strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Pengarusutamaan Gender, bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.²⁵

F. Perempuan dalam Pembangunan Politik

Perempuan dalam proses konstruksi sosial di masyarakat, peran perempuan bersifat domestik sehingga timbul adanya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender. Namun, perubahan kebijakan melihat kebutuhan bahwa perempuan semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena juga dibutuhkan pemikirannya, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik, karena keduanya memiliki nilai yang sama. Adapun studi kertiabatan perempuan dalam politik sebagai berikut:²⁶

Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%

Mariana Amiruddin, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan

Menjelang Pemilu 2014, isu keterwakilan perempuan di partai politik kembali menjadi topik perbincangan. Masalah perempuan dan politik ini tentu tidak lepas dari perkembangan sistem politik dan partai yang ada di Indonesia. Ani Sucipto, pakar politik dari Universitas Indonesia, menyayangkan metode pemilu masih dengan suara terbanyak, padahal banyak perempuan caleg rata-rata tidak memiliki basis sosial, karena kurangnya kesempatan mereka di ruang-ruang publik. Bahkan Pilkada Jabar beberapa waktu lalu, isu penolakan perempuan sebagai pemimpin kembali terangkat di masyarakat, ini karena basis sosial yang tidak dikuasai caleg perempuan, selain itu karena masyarakat masih belum sepenuhnya menerima perempuan sebagai pemimpin, kecuali sudah dikenal sebelumnya. Masalah ini juga dapat kita temukan di daerah lain seperti Aceh dan Papua.

²⁵Waston Malau, "Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan", *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 6 (2) (2014): 125-131, h. 3-6.

²⁶Mariana Amiruddin, "Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%", *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Media Indonesia, Jumat, 8 Maret 2013 dan Senin, 11 Maret 2013.

Apa yang perlu disiapkan caleg-caleg perempuan? Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan, menyatakan "Gali ilmu, gali potensi kita dan belajar hal-hal yang positif dari para pendahulu seperti mantan Presiden Indonesia Megawati Sokarnoputri, atau mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Namun, soal kesiapan perempuan calon legislatif tidak bisa lepas dari partai masing-masing, yaitu banyak partai yang tidak mampu mengisi kuota perempuan. Bukan berarti tidak ada calon, melainkan tidak adanya kaderisasi pengurus perempuan, dan budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan. Regulasi sudah bagus, tetapi tanpa dukungan budaya dan persepsi masyarakat, regulasi ini tidak terlalu banyak mendorong jumlah keterwakilan perempuan. Siasat partai bahkan untuk mengisi kuota ini sangat mengecewakan, yaitu dengan mengambil caleg perempuan yang sudah populer seperti artis atau perempuan pengusaha. Suatu tindakan pragmatis yang justru mengabaikan keseriusan proses politik. Atau perempuan yang tidak populer hanya dijadikan sebagai pemanis, tidak sungguh-sunggu menempatkan mereka di wilayah strategis. Ini terlihat dari penempatan perempuan di nomor urut sepatu (paling belakang) atau di daerah pemilihan yang "gersang" yang wilayah tersebut justru menolak kehadiran caleg perempuan. Selain itu, KPU malah membolehkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan alasan bila tidak terpenuhi ketentuan 30% persen perempuan. Bahkan, partai politik melepas tangan caleg-caleg perempuan, dengan segala keterbatasannya harus bertarung dan berebut suara dengan caleg laki-laki dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Dari proses tersebut, kita dapat melihat hasilnya, sedikit yang duduk di parlemen, dan kalaupun ada, mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai NasDem Siti Nurbaya, dalam sebuah wawancara menjawab tentang apa persoalan dan apa yang perlu disiapkan untuk menguatkan kapasitas perempuan di partai. Ia melakukan perbandingan dengan Argentina, Partai Peronis menyiapkan kuota perempuan butuh belasan tahun, dan dalam prosesnya mereka menyiapkan peningkatan kualitas perempuan. Di sini menurutnya terlalu instan sehingga perempuan hanya dijadikan komoditas untuk memenuhi syarat kualifikasi partai. Padahal ada kenyataan bahwa partai politik kurang membuka diri dan memberikan kesempatan. Di negara Swedia, Norwegia, Belanda dan Selandia Baru, parpol mempersiapkan kader perempuan dengan baik sehingga kuota perempuan mereka berhasil sekali. Menjawab masalah minimnya perempuan memenuhi kuota dalam partai, Siti Nurbaya mengatakan bahwa harus diiringi dengan pendidikan, pelatihan dan kesadaran politik untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri perempuan. Tentu percuma bila ini dilakukan tanpa ada kemauan parpol untuk memberikan peluang besar kepada perempuan untuk bersaing. Siti juga menjelaskan bahwa saat ini memang banyak perempuan di parlemen yang terseret kasus korupsi. Padahal kehadiran mereka dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar kehidupan masyarakat yang ditopang perempuan. Bahwa terdapat data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa kesempatan kerja perempuan masih 58% dibandingkan laki-laki 84%. Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Abdul Halim, menyambung masalah ini bahwa terjadi pengabaian terhadap perempuan pekerja. Misalnya pekerjaan nelayan masih diorientasikan sebagai laki-laki, padahal banyak nelayan perempuan dan malah cenderung meningkat.

Fakta lainnya seperti yang disebut Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2008, justru perempuan yang menghidupkan sektor perikanan di Indonesia yang mencapai 2,3 juta orang. Perempuan Indonesia banyak yang bertanggung jawab dalam produksi pangan, baik petani maupun nelayan, tetapi akses mereka masih terbatas terhadap sumber produksi seperti air, lahan, sarana produksi pertanian atau perikanan, dan sulit mengakses pasar, dan sering terlupakan dalam program bantuan dan kredit perbankan. Bukan hanya itu, Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa perempuan banyak bekerja di sektor informal yang umumnya tidak tercatat. Padahal peran mereka mencapai 70% untuk usaha mikro dan kecil. Bahkan dari sisi tenaga kerja Indonesia, 70% lebih perempuan telah mengirimkan devisa bagi Indonesia atau uang bagi kehidupan keluarganya mencapai US\$5,7 miliar. Angka ini tentu menjadi menguatkan mengapa keterwakilan perempuan di politik sangat penting untuk memperhatikan masyarakat perempuan di Indonesia yang banyak memberikan kontribusi untuk Negara.

Berdasarkan studi kasus di atas, terlihat kuota 30% perempuan untuk menduduki partai politik memberikan harapan kepada perempuan untuk ikut andil dalam pembangunan. Peran perempuan yang sejatinya, reproduksi (ibu + istri), produksi (pencari nafkah tambahan), masyarakat (pengelolaan masyarakat dan layanan sukarela misalnya menjadi kader kesehatan), dapat juga menyelesaikan problem-problem perempuan dengan adanya kuota 30%. Kenapa kuotanya 30%? Kenapa tidak 20%, 50%, 70%, dan sebagainya. Karena perempuan tidak lepas dari peran utamanya sebagai ibu rumah tangga. Peran total diberikan kepada laki-laki, karena peran laki-laki, reproduksi (ayah), produksi (mencari nafkah), dan masyarakat (kepemimpinan, politik, pertahanan, dan seringkali bersifat formal dan dibayar).

Peran gender tersebut tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan. Ada wilayah-wilayah yang bisa dilakukan laki-laki tetapi tidak bisa dilakukan perempuan. Misalnya banyak pekerjaan laki-laki yang bisa dilakukan perempuan seperti kenek bus, security, sopir, tukang bangunan, politik, pabrik garmen, pabrik rokok, mall-mall, sekretaris, dan sebagainya sudah banyak yang melibatkan perempuan. Sedangkan pekerjaan yang biasanya dilakukan perempuan bisa dilakukan laki-laki seperti koki, pekerja salon, dan sebagainya. Peran gender dapat dipertukan dan berubah tergantung konstruksi sosial budaya masyarakat.

Dalam jurnal disebutkan, *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 2008, justru perempuan yang menghidupkan sektor perikanan di Indonesia yang mencapai 2,3 juta orang. Perempuan Indonesia banyak yang bertanggung jawab

dalam produksi pangan, baik petani maupun nelayan, tetapi akses mereka masih terbatas terhadap sumber produksi seperti air, lahan, sarana produksi pertanian atau perikanan, dan sulit mengakses pasar, dan sering terlupakan dalam program bantuan dan kredit perbankan. Bukan hanya itu, Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa perempuan banyak bekerja di sektor informal yang umumnya tidak tercatat. Padahal peran mereka mencapai 70% untuk usaha mikro dan kecil. Bahkan dari sisi tenaga kerja Indonesia, 70% lebih perempuan telah mengirimkan devisa bagi Indonesia atau uang bagi kehidupan keluarganya mencapai US\$5,7 miliar. Angka ini tentu menjadi menguatkan mengapa keterwakilan perempuan di politik sangat penting untuk memperhatikan masyarakat perempuan di Indonesia yang banyak memberikan kontribusi untuk negara.²⁷ Jadi, isu perempuan termarginalkan tidak ada. Islam dan UUD 1945 mengajarkan pentingnya keadilan gender.

G. Kesimpulan

Persoalan dalam pembangunan yaitu komunikasi dan partisipatif masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasmita (1955) "pembangunan memang dapat juga berjalan dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah namun hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi rakyat". Gender sangat berpengaruh dalam pembangunan. Gender dan jenis kelamin (*sex*) merupakan hal yang berbeda, tetapi mempunyai suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Gender yang terkait dengan tingkah laku dan pembagian fungsi ke dalam bentuk feminin dan maskulin berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang lebih mengklasifikasikan manusia berdasarkan struktur dan ciri biologis.

Gender sebagai proses 'konstruksi sosial' di dalam masyarakat. Konstruksi sosial merupakan pembentukan dari sistem konseptual kebudayaan dan linguistik. Gender juga merupakan alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Ditegaskan bahwa gender adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dan ternyata, perbedaan gender antara laki-laki dan

²⁷ Ulfatun Hasanah, analisis penulis terhadap isi jurnal.

perempuan terjadi melalui proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi, sosial budaya bahkan melalui kekuasaan negara. Sedemikian panjang dan lamanya proses “genderisasi” secara sosial budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya menjadi seolah-olah ketentuan dari Tuhan, atau bersifat kodrati dan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Peran gender tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah yang bisa dilakukan laki-laki tetapi tidak bisa dilakukan perempuan, demikian sebaliknya ada wilayah yang bisa dilakukan perempuan tetapi tidak bisa dilakukan laki-laki, seperti halnya kuota 30% perempuan dalam parpol.[]

Daftar Pustaka

- Abdullah, Jihan, “Kesetaraan Gender dalam Islam”, *Jurnal Musawwa*, Vol. 1 (1), 2009.
- Aisah, Anisa Siti, dkk, “Gender Sebagai Konstruksi Sosial”, diakses Jum’at 10 Juni 2016, dalam <http://tangan-malaikat.blogspot.com/2016/06/makalah-gender-sebagai-konstruksi-sosial.html?m=1>.
- Amiruddin, Mariana, “Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%”, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Media Indonesia, Jumat, 8 Maret 2013 dan Senin, 11 Maret 2013.
- Antrobus, P., *The Global Women’s Movement*, Bangladesh: The University Press, 2004.
- Anonim, “Apa Arti Budaya Patriarki?”, dalam http://id.answers.yahoo.com/question/index?_e_pi_=7%2CPAG_ID10%2C3573569691.
- Anonim, “Perempuan Kenek Bus,” dalam <http://remcakram.com>.
- Anonim, “Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota tanpa Kader”, dalam <http://www.jurnalperempuan.org/perempuan-dan-partai-politik-fenomena-kuota-tanpa-kader.html>
- Anonim, “30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parpol Diharapkan hingga Kabupaten,” diakses Senin, 28 November 2016 21:12 WIB Kompas TV.
- Anonim, “Strategi Komunikasi Pembangunan, dalam <http://lalatnasrul.blogspot.co.id/2014/02/strategi-komunikasi-pembangunan.html>.

- Azra, Azyumardi, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*, Bandung: Angkasa, 2008.
- Fadlan, "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an", *Jurnal Karsa*, Vol. 19 (2), 2011.
- Fakih, M., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Imoh, Grade O, "Application of Development Communication in Africa's Rural Development-Need for A Paradigm Shift," *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences* 1, 2013.
- Maharani, Lailakhamsi, "Peningkatan Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, dalam <http://sumbarprov.go.id/details/news/4948>.
- Malau, Waston, "Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6 (2), 2014.
- Munawar, Imam, "Komunikasi Partisipatif dalam Proses Pembangunan Pabrik Semen di Desa Tipar Kidul Ajibarang Banyumas", dalam makalah Komunikasi Pembangunan, 2017.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Pasaribu, Vera A. R, "Perempuan dan Pembangunan Nasional Indonesia", dalam karya ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP nommensen, Medan, 2009.
- Pipes, Daniel, "Kata Pengantar: Memahami Wanita Pelaku Bom Bunuh Diri", dalam artikel asli Foreword Understanding Female Suicide Bombers, 2012.
- Purba, Orinton, "*Konsep dan Teori Gender*", dalam <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/>. diakses 9 Agustus 2010.
- Puspitawati, Herien, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", dalam Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor 2013. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>
- R., Sinulingga, dalam *Jurnal Wawasan*, Juni, Volume 12, Nomor 1. Medan: USU 2006.
- Setiawan, Afriandi dkk, *Gender dan Pembangunan*, diakses 2011, dalam <https://arificintaselvia.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/>

Tim Penerjemah al-Qur'an Depag RI., *al-Hidayah (al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka)*. Jakarta: PT Kalim, 2010.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

